



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81/PMK.05/2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
TINGKAT III BENGKULU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 204/KMK.05/2014;
- c. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor: B/2143/IV/2015/Pusdokkes tanggal 29 April 2015, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit

Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BENGKULU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.



Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/ menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Berdasarkan Kelas;
- b. Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap;
- b. Tarif Tindakan Medis Operatif; dan
- c. Tarif Kebidanan.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Instalasi Rawat Jalan;
- b. Tarif Instalasi Gawat Darurat;
- c. Tarif Instalasi *Care Unit*;



- d. Tarif Radiologi;
- e. Tarif Laboratorium;
- f. Tarif Kedokteran Kepolisian;
- g. Tarif Pendidikan dan Pelatihan; dan
- h. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas VIP, dan Kelas VVIP.
- (2) Tarif Kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Tarif Kelas VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, tarif Kelas VIP, dan tarif Kelas VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.



- (2) Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan salinan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, tarif Kelas VIP, dan tarif Kelas VVIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terhadap obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah profit margin sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain.



Pasal 12

- (1) Terhadap layanan kedokteran kepolisian, korban kecelakaan tanpa identitas, dan/atau pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

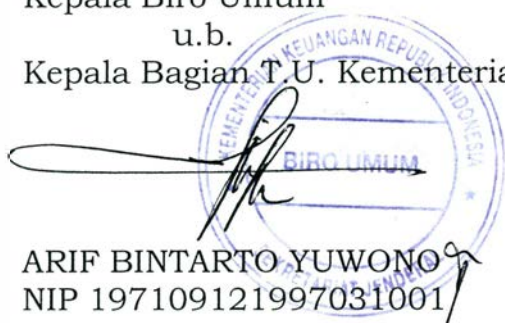
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 755

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79/PMK.05/2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TINGKAT III BENGKULU PADA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BENGKULU PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF KELAS II


| No | Jenis Layanan | Satuan | Tarif (Rp) |
|----|---|--------------|-----------------------------|
| A. | Rawat Inap | | |
| | 1. Ruang Rawat Inap Kelas II | Per hari | 364.000,- |
| | 2. Tindakan di Ruang Rawat Inap | | |
| | a. Sederhana | Per tindakan | 15.000,- s.d 30.000,- |
| | b. Sedang | Per tindakan | 35.000,- s.d 50.000,- |
| | c. Besar | Per tindakan | 50.000,- s.d 250.000,- |
| B. | Tindakan Medis Operatif Instalasi Bedah | | |
| | 1. Kecil | Per tindakan | 270.000,- s.d 4.145.000,- |
| | 2. Sedang | Per tindakan | 2.290.000,- s.d 4.800.000,- |
| | 3. Besar | Per tindakan | 3.485.000,- s.d 4.800.000,- |
| | 4. Khusus | Per tindakan | 4.800.000,- |




| | | | |
|----|---|-----------|-------------|
| C. | Kebidanan | | |
| | 1. Persalinan Normal oleh Dokter | Per paket | 1.334.000,- |
| | 2. Persalinan Patologis oleh Dokter | Per paket | 1.495.000,- |
| | 3. <i>Curetage</i> | Per paket | 2.035.500,- |
| | 4. Manual Plasenta | Per paket | 1.380.000,- |
| | 5. Tindakan <i>Verlos Kamer</i> (VK) (Gagal Induksi, Gagal Vakum, <i>Abortus Iminens</i> , <i>Partus Prematurus Iminens</i> (PPI), <i>Plasenta Previa</i> , Kehamilan Ektopik Terganggu(KET)) | Per paket | 260.000,- |

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT

BHAYANGKARA TINGKAT III BENGKULU PADA KEPOLISIAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BENGKULU PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

| No | Jenis Layanan | Satuan | Tarif (Rp) |
|----|----------------------------|---------------|------------------------|
| A. | Instalasi Rawat Jalan | | |
| | 1. Administrasi | Per pasien | 10.000,- |
| | 2. Asuransi | Per surat | 35.000,- |
| | 3. Pemeriksaan Dokter | | |
| | a. Dokter Umum | Per kunjungan | 30.000,- |
| | b. Dokter Spesialis | Per kunjungan | 55.000,- |
| | c. Jasa Keperawatan | Per kunjungan | 15.000,- |
| | 4. Poli Umum | | |
| | a. Injeksi | Per tindakan | 15.000,- |
| | b. Surat Keterangan Dokter | Per surat | 55.000,- |
| | 5. Poli THT | | |
| | a. Telinga | Per tindakan | 85.000,- s.d 115.000,- |
| | b. Hidung | Per tindakan | 50.000,- s.d 115.000,- |
| | 6. Poli Jantung | Per tindakan | 75.000,- |

dk

| No | Jenis Layanan | Satuan | Tarif (Rp) |
|----|---|-----------------|------------------------|
| | 7. Poli Bedah | Per tindakan | 10.000,- s.d 50.000,- |
| | 8. Poli Kandungan | Per tindakan | 10.000,- s.d 115.000,- |
| | 9. Poli Mata | Per tindakan | 30.000,- s.d 290.000,- |
| | 10. Poli Syaraf | Per tindakan | 30.000,- |
| | 11. Poli Penyakit Dalam | Per tindakan | 10.000,- s.d 50.000,- |
| | 12. Poli Gigi | | |
| | a. Konsultasi | Per pasien | 53.000,- |
| | b. Konservasi | Per tindakan | 65.000,- s.d 130.000,- |
| | c. Bedah | Per tindakan | 70.000,- s.d 160.000,- |
| | d. Periodontologi | Per tindakan | 165.000,- |
| B. | Instalasi Gawat Darurat (IGD) | | |
| | 1. Administrasi | Per kunjungan | 10.000,- |
| | 2. Resume Medik | Per resume | 35.000,- |
| | 3. Pemeriksaan | | |
| | a. Dokter Umum | Per pemeriksaan | 28.000,- |
| | b. Dokter Spesialis | Per pemeriksaan | 65.000,- |
| | c. Jasa Keperawatan | Per kunjungan | 20.000,- |
| | 4. Konsultasi Dokter Spesialis <i>via Phone</i> | Per konsultasi | 40.000,- |
| | 5. Tindakan di IGD | Per tindakan | 15.000,- s.d 495.000,- |
| C. | <i>Intensive Care Unit (ICU)</i> | | |
| | 1. Administrasi | Per pasien | 50.000,- |
| | 2. Kamar | Per hari | 300.000,- |
| | 3. Visite Dokter | | |

12

| No | Jenis Layanan | Satuan | Tarif (Rp) |
|----|----------------------------------|-----------------|------------------------|
| | a. Dokter Umum | Per kunjungan | 30.000,- |
| | b. Dokter Spesialis | Per kunjungan | 125.000,- |
| | 4. Konsultasi Dokter via Telepon | Per konsultasi | 20.000,- |
| | 5. Jasa Keperawatan | Per hari | 300.000,- |
| | 6. Gizi | Per hari | 80.000,- |
| | 7. Tindakan di Ruang ICU | Per tindakan | 15.000,- s.d 250.000,- |
| | 8. Penggunaan Alat | | |
| | a. Monitor | Per hari | 60.000,- |
| | b. <i>Syringe Pump</i> | Per hari | 175.000,- |
| | c. GDA Stick | Per pemeriksaan | 30.000,- |
| | d. Ventilator | Per hari | 200.000,- |
| | e. Matras Dekubitus/Udara | Per hari | 50.000,- |
| | f. <i>C PAP</i> | Per hari | 200.000,- |
| | g. <i>ECG Tanpa Bacaan</i> | Per hari | 60.000,- |
| | h. <i>Infant Radiant Warmer</i> | Per hari | 100.000,- |
| | i. <i>Mix Safe</i> | Per jam | 100.000,- |
| | j. Oksigen (O2) | Per jam | 50.000,- |
| D. | Radiologi | | |
| | 1. Ekstremitas Atas | | |
| | a. Biasa | Per 1 film | 116.000,- |
| | b. <i>Cyto</i> | Per 1 film | 141.000,- |
| | 2. Ekstremitas Bawah | | |

Ch

| No | Jenis Layanan | Satuan | Tarif (Rp) |
|----|-------------------------|------------|----------------------------|
| | a. Biasa | Per 1 film | 116.000,- |
| | b. <i>Cyto</i> | Per 1 film | 141.000,- |
| | 3. <i>Vertebrae</i> | | |
| | a. Biasa | Per 2 film | 175.000,- s.d 215.000,- |
| | - <i>V Lumbo Sacral</i> | Per 3 film | 290.000,- |
| | b. <i>Cyto</i> | Per 2 film | 158.000,- s.d 255.000,- |
| | - <i>V Lumbo Sacral</i> | Per 3 film | 345.000,- |
| | 4. <i>Abdomen</i> | | |
| | a. Biasa | | |
| | 1) BNO | Per 1 film | 135.000,- |
| | 2) BNO 2 posisi | Per 2 film | 210.000,- |
| | 3) BNO 3 posisi | Per 3 film | 290.000,- |
| | b. <i>Cyto</i> | | |
| | 1) BNO | Per 1 film | 160.000,- |
| | 2) BNO 2 posisi | Per 2 film | 250.000,- |
| | 3) BNO 3 posisi | Per 3 film | 345.000,- |
| | 5. <i>Cranial</i> | | |
| | a. Biasa | | |
| | 1) Orbita | Per 1 film | 115.000,- |
| | 2) Mastoid | Per 1 film | 115.000,- |
| | 3) Os Nasal | Per 1 film | 180.000,- |
| | 4) <i>SPN Waters</i> | Per 1 film | 115.000,- |
| | 5) <i>Dental</i> | Per 1 film | 115.000,- |
| | 6) <i>Cranium</i> | Per 2 film | 180.000,- |
| | 7) Mandibula | Per 2 film | 180.000,- |

| No | Jenis Layanan | Satuan | Tarif (Rp) |
|----|-------------------------------------|-----------------|------------------------|
| | 8) <i>Temporal Mandibular Joint</i> | Per 4 film | 300.000,- |
| | b. <i>Cyto</i> | | |
| | 1) Orbita | Per 1 film | 140.000,- |
| | 2) Mastoid | Per 1 film | 140.000,- |
| | 3) Os Nasal | Per 1 film | 220.000,- |
| | 4) <i>SPN Waters</i> | Per 1 film | 140.000,- |
| | 5) <i>Dental</i> | Per 1 film | 140.000,- |
| | 6) <i>Cranium</i> | Per 2 film | 220.000,- |
| | 7) Mandibula | Per 2 film | 220.000,- |
| | 8) <i>Temporal Mandibular Joint</i> | Per 4 film | 370.000,- |
| E. | Laboratorium | | |
| | 1. Darah Lengkap | Per pemeriksaan | 140.000,- |
| | 2. Darah Rutin | Per pemeriksaan | 120.000,- |
| | 3. Hematologi | Per pemeriksaan | 20.000,- |
| | 4. Morfologi Darah Tepi | Per pemeriksaan | 100.000,- |
| | 5. Urin Lengkap | Per pemeriksaan | 30.000,- |
| | 6. Feces Rutin | Per pemeriksaan | 55.000,- |
| | 7. Kimia Darah | Per pemeriksaan | 30.000,- s.d 75.000,- |
| | 8. Imunoserologi | Per pemeriksaan | 50.000,- s.d 300.000,- |


Handwritten signature

| No | Jenis Layanan | Satuan | Tarif (Rp) |
|----|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| | 9. Elektrolit | Per pemeriksaan | 120.000,- |
| | 10. Golongan Darah | Per pemeriksaan | 25.000,- |
| | 11. Tes Kehamilan | Per pemeriksaan | 25.000,- |
| | 12. Analisa Cairan Pleura | Per pemeriksaan | 200.000,- |
| | 13. Narkoba | Per pemeriksaan | 40.000,- s.d 240.000,- |
| | 14. Malaria | Per pemeriksaan | 20.000,- |
| | 15. Hormon | Per pemeriksaan | 230.000,- s.d 350.000,- |
| F. | Kedokteran Kepolisian | | |
| | 1. Visum Hidup | Per pasien | 230.000,- |
| | 2. Visum Jenazah | Per jenazah | 2.610.000,- |
| | 3. Forensik | Per jenazah | 9.210.000,- |
| | 4. Gali Kubur | Per jenazah | 2.800.000,- |
| G. | Pendidikan dan Pelatihan | | |
| | 1. Magang | Per orang per kegiatan | 50.000,- s.d 150.000,- |
| | 2. Pra Penelitian | Per orang per kegiatan | 50.000,- s.d 100.000,- |
| | 3. Penelitian | Per orang per kegiatan | 50.000,- s.d 200.000,- |
| H. | Penggunaan Sarana dan Prasarana | | |
| | <i>Ambulance</i> | | |

| No | Jenis Layanan | Satuan | Tarif (Rp) |
|----|----------------|-----------|------------|
| 1. | Tarif Dasar | Per 10 km | 100.000,- |
| 2. | Tarif Tambahan | Per km | 15.000,- |

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001